


# Menelusuri Paradigma Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Konteks Bernegara


 **Muhammad Ullin Nuha**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

 muhammadullinn@gmail.com

 **Hidayatul Maslakha**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

 hdyhhilma@gmail.com

\*Korespondensi: muhammadullinn@gmail.com

## Informasi Artikel

Dikirim: 30 Maret 2024

Revisi: 30 April 2024

Diterima: 20 Juni 2024

Terbit: 30 Juni 2024

### **Kata kunci:**

Paradigma, Politik  
Kebangsaan,  
Nahdlatul Ulama

## Abstrak

*The aim of this research is to reflect further on the national political paradigm of NU as one of the the largest social organizations in Indonesia. The national political paradigm of NU must continue to be in harmony and line with the basic principles of Ahlussunnah Wal Jama'ah. The approach to this research is qualitative and the type uses library research methods using literature (libraries). The results of this research are that the ideal framework of NU as a jahiliyyah diniyah ijtimaiyyah (religious and social organization) must be strengthened to prevent religious organizations from being weakened by practical political desires that can weaken them. This spirit and strategy can be used not only by Nahdlatul Ulama, but also by other Islamic organizations that continue to fight for their position in the national community. In this way, sociopolitical articulation as jam'iyah diniyah ijtimaiyyah will develop paradigmatically.*

Tujuan dari penelitian ini adalah merefleksikan lebih jauh lagi bagaimana paradigma politik kebangsaan NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Yang mana paradigma politik kebangsaan NU harus terus sejalan selaras dan senafas dengan prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah Wal Jama'ah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenisnya menggunakan metode penelitian library research dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Hasil dari penelitian ini adalah kerangka ideal NU sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) harus diperkuat untuk mencegah organisasi keagamaan terlemahkan oleh keinginan politik praktis yang dapat melemahkannya. Semangat dan struktur ini dapat digunakan bukan hanya oleh Nahdlatul Ulama, tetapi juga oleh organisasi Islam lainnya yang terus berjuang untuk posisi mereka di masyarakat kebangsaan. Dengan demikian, artikulasi sosiopolitik sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyyah akan berkembang secara paradigmatis.

## PENDAHULUAN

Perjalanan bangsa Indonesia yang terhitung sudah sangat lama dalam mengisi kemerdekaan bangsa ternyata saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai polemik yang krusial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, praktik korupsi di pemerintahan bahkan sampai Masyarakat lapisan bawah, rendahnya Pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan lain-lain. Polemik tersebut ternyata memberi dampak terhadap pelapukan proses keadaban bangsa Indonesia, terutama dalam membangun kecerdasan berfikir yang berlandaskan pada moralitas. Tak heran, jika keadaban bangsa ini sedang dipertaruhkan dengan segudang probmatika sosial-ekonomi, politik, dan agama. Belakang ini, yang sedang hangat menjadi bahan perbincangan adalah konteks pergulatan politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kerap kali lebih mementingkan kepentingan partai politik daripada rakyat Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU) lahir sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut serta memikul beban tanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam mewujudkan cita-cita keadaban bangsa. Sebab NU dilahirkan tidak hanya ditujukan kepada jamaahnya, namun bagaimana NU bisa memberikan sumbangsuhnya kepada bangsa. Secara substansi NU telah merumuskan konsep mabadi' khoiro ummat (prinsip dasar umat terbaik). Kalimat Khaira Ummah diambil dari kandungan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ  
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”<sup>1</sup>

Didasarkan pada orientasi moral sebagai perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Penguatan moralitas tersebut bertumpu pada as-shidq (kejujuran) dan al- amanah (tanggung jawab). Kedua, dalam ranah keagamaan, NU telah berhasil merumuskan gagasan dasar tentang *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan). Nahdlatul Ulama (NU) juga telah salah satu yang memelopori penerimaan serta pengamalan Pancasila sebagai asas dalam berbangsa dan bernegara yang dapat diterima oleh rakyat Indonesia yang kental akan multikulturalnya. Atas dasar tersebut, kita wajib memelihara dan mempertahankan asas-asas dasar kenegaraan yang telah dirumuskan oleh para pendahulu, melalui darah para pejuang dan syuhada. Dari kedua hal tersebut, timbullah hipotesis bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia akan mendongkrak

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=200>

kekuatan politik (political power) berbasis massa atau umat yang terus melekat dalam gerakan-gerakan kultural, nalar, dan aktualisasi spirit sosial kebangsaannya.

Gambaran singkat di atas cukup dijadikan salah satu kajian untuk merefleksikan lebih jauh lagi bagaimana paradigma politik kebangsaan NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Dan tentu saja paradigma politik kebangsaan NU harus terus sejalan selaras dan senafas dengan prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah Wal Jama'ah yang sudah dipaparkan pada muqoddimah, yang telah lama diamalkan dan diajarkan para pendiri (mu'assis) Jam'iyah ini sendiri dalam kancah perpolitikan secara mikro maupun makro. Alhasil dari penulisan studi literatur ini guna melihat paradigma politik kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam bernegara.

### **Metode Penulisan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin memahami dan mengungkap permasalahan yang sedang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>2</sup> Melalui penelitian kualitatif ini peneliti dapat mengenali subjek, dan ikut merasakan permasalahan yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, peneliti akan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan mengungkapkan fenomena dan permasalahan yang sedang terjadi pada Era politik yang berkaitan dengan Paradigma Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Dalam Bernegara, yang kemudian hasil dari penelitian ini akan dihimpun dalam bentuk kata-kata.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep tentang Paradigma**

Dalam KBBI paradigma (ejaan: pa.ra.dig.ma; *n Ling* daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut, *n* model dalam teori ilmu pengetahuan dan *n* kerangka berpikir) dalam disiplin intelektual adalah cara seseorang melihat diri mereka sendiri dan lingkungan mereka, yang akan mempengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Istilah ini biasanya mengacu pada cara orang berpikir dan cara menyelesaikan masalah. Seorang ilmuwan bernama Thomas Kuhn pertama kali menggunakan istilah ini dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang atau sebuah kelompok sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra subjektif – mengenai realita – dan akhirnya akan menentukan bagaimana ia menanggapi realitas.

Dalam bahasa sederhana, paradigma adalah cara pandang, pola pikir, cara berpikir. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) paradigma

---

<sup>2</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

diartikan sebagai kerangka berpikir.<sup>3</sup> Paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani *paradeigma* (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik).

Sedangkan politik menurut KBBI (ejaan: po.li.tik; *n* (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): *bersekolah di akademi --, n* segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: -- *dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang --, ekonomi, dan kebudayaan; partai -- ; organisasi --, n* cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan: -- *dagang; -- bahasa nasional*) adalah proses pembentukan masyarakat yang mencakup proses pengambilan keputusan, terutama di negara. Ini adalah penjelasan yang menggabungkan berbagai definisi ilmu politik tentang hakikat politik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.<sup>4</sup> Sedangkan paradigma politik adalah suatu kerangka berfikir untuk mendapatkan pengertian tentang politik dan kemudian akan menyeluruh pada bagian-bagian lainnya dalam ilmu politik. Karena sebuah paradigma akan melahirkan cara, teknik, metode, strategi hingga teori pada suatu jenis ilmu.

### **Politik Kebangsaan sebagai Asas Etik Politik Islam Secara Umum**

Jika politik dan Islam dipahami sebagai cara untuk menata kehidupan manusia, keduanya sangat terkait secara historis dan normatif. Islam tidak hanya digunakan sebagai "alat legitimasi" kekuasaan. Jika politik dipahami secara parsial dengan mengabaikan pemahaman yang lebih mendalam, itu pasti akan mengaburkan artinya dan menghilangkan peran Islam dalam dunia politik. Oleh karena itu, Islam harus digunakan sebagai sumber inspirasi kultural dan kerangka paradigmatis yang selalu berubah dalam pemikiran politik.

Seiring dengan kecepatan ekspansi Islam keluar jazirah Arab, ajaran dan pemikiran politik Islam muncul sebagai hasil dari sistematisasi kerangka politik agama Islam dan tradisi kaum muslimin. Selain menimbulkan konsekuensi logis dari munculnya kelompok kepentingan, hal ini menimbulkan masalah baru tentang bagaimana negara diatur atau dikuasai. Orang-orang dari kelompok sosial budaya atau keagamaan ini merasa telah membantu proses jihad. Sangat dihargai apa yang dikatakan Abu A'la Al Maududi bahwa kekuasaan agama dapat menjadi lebih kuat jika kekuasaan agama lebih eksis dan paripurna.<sup>8</sup> Selain itu, sejumlah tokoh penting seperti Ibn Sina, Al Farabi, Al Kindi, Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh teologis seperti

---

<sup>3</sup> Perspektif ini juga disarikan salah satunya dari cara pandang Thomas Khun dan beberapa pemikir lain di bidang filsafat pengetahuan.

<sup>4</sup> Pengantar Ilmu Politik oleh Seta Basri, 2011, Indie Book Corner: Jokjakarta. H.15

Plato, Arestoteles, dan lain-lain telah lama membahas hubungan penting antara agama dan politik (kekuasaan) negara.

Mungkin juga dipikirkan bahwa ikhtilaf atau perbedaan pemikiran politik dalam Islam ini lebih disebabkan oleh cara dan semangat menafsirkan teks normatif agama daripada perbedaan sosial budaya yang melingkari mereka. Salah satu tujuan utama Alquran adalah untuk menyediakan landasan etika untuk membangun sistem politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar masyarakat yang adil dan bermoral (berakhlak). Khilafah juga merupakan salah satu masalah yang paling diperdebatkan dalam sejarah pemikiran politik Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masyarakat Islam yang baru dibentuk segera menghadapi krisis konstitusional karena proses pemilihan pemimpin negara untuk menggantikan posisinya. sebagai contoh pemimpin tertinggi dalam komunitas Islam. Karena dalam Alquran dan AsSunnah tidak ada ketentuan yang benar-benar jelas, lengkap, dan selesai yang tidak terganggu oleh pemikiran manusia tentang cara, struktur, dan penampilan lembaga politik itu sendiri.

Bisa dilihat dari gambaran dinamis di atas bahwa Alquran tidak berbicara tentang masalah ini memberikan jaminan dan kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan analisis, studi, dan otokritik konstruktif saat mereka membuat sistem politiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, mengkaji pemikiran politik dan sistem ketatanegaraan Islam harus difokuskan pada upaya menerjemahkan cita-cita politik Islam dengan membuat format dan system sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Karena jumlah penduduk muslim yang sangat besar, banyak pihak ingin mengganggu atau bahkan mengganggu ketentraman dan keharmonisan kaum muslimin dalam menjalani rutinitas kehidupan mereka, terutama dalam hal pergulatan sosial politik mereka. Jadi, banyak ide-ide baru muncul yang seolah-olah ingin memperbaiki peradaban Islam, tetapi pada kenyataannya mereka juga berusaha untuk mendapatkan kekuasaan sehingga mereka dapat menyebarkan ide-ide dan hasil pemikiran mereka tentang Islam itu sendiri. Inilah yang belakangan ini menjadi perhatian di Indonesia.<sup>5</sup>

Untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi, diperlukan landasan politik yang direncanakan secara strategis yang akan menguntungkan semua komunitas muslim di seluruh dunia. Untuk mencapai kesepakatan politik antara golongan Islam, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam dan menyeluruh tentang politik Islam. Sudah jelas bahwa tujuannya adalah untuk mencegah kekuatan yang sangat besar dan potensial yang ada dalam tubuh Islam ini terbuang sia-sia hanya dengan memicu konflik antar saudara dengan alasan klaim kebenaran. atau karena mereka hanya ingin mendapatkan legitimasi kekuasaan politik untuk kepentingan mereka sendiri dan menghilangkan nilai Islam yang sangat diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW.

### **Konsep-Konsep Dasar Politik *Ahlussunnah Wal Jamaah***

---

<sup>5</sup> Masmuni Mahatma, (2017). *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 31-54*

*Ablussunnah Wal Jama'ah* secara literal adalah pengikut Sunnah Nabi dan para sahabatnya. Istilah ini digunakan untuk pertama kalinya pada abad kedua *Hijriyyah*. Selain itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pengikut *Ablussunnah Wal Jama'ah* adalah satu-satunya "golongan yang selamat" (*firqah al-Najiyah*) dari 73 golongan Islam. Selama berabad-abad, *Ablussunnah Wal Jama'ah* telah menjadi tradisi historis dan sekarang telah masuk ke dunia politik. Namun, para pengikut *Ablussunnah Wal Jama'ah* adalah pengikut Sunnah Nabi dan ijma' ulama.

Mengambil sikap tawasuth, tawazun, ta'addul, dan tasamuh, serta *al-qiyam bi al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi aljadid al-ashlah*, adalah prinsip umum dari ajaran sosial politik Sunni. Dengan prinsip ini, Sunni selalu bersikap akomodatif, toleran, dan moderat dalam menghadapi budaya apapun, termasuk budaya politik kekuasaan. Dalam konteks politik, sikap seperti itu digunakan sebagai struktur dan kerangka paradigmatis untuk setiap pemikiran dan perspektif politiknya. Karena syariah tidak dapat diterapkan tanpa dukungan politik, Sunni percaya bahwa mendirikan negara adalah kewajiban syar'i. Ini adalah hujjah awal yang selalu ditarik oleh mazhab Sunni atau *Ablussunnah Wa al-Jamaah*, terutama ketika mereka menghadapi krisis politik kemaslahatan atau kebajikan demi kelangsungan umat.

Dilansir dari NU Online oleh Fathoni Ahmad, bagi ulama dan hamba-hamba "alim" lainnya, politik bukanlah dunia yang gelap. Menurut para alim dan ulama, politik adalah ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai wasilah untuk menyejahterakan rakyat melalui kepemimpinan. Para ulama menggunakan literatur *fiqih siyasah*, *qoidah fiqih*, dan sejarah Islam (*tarikh*) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan politik. Mereka berarti para ulama tidak melepaskan diri dari prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam konteks praktik politik maupun dalam aktivitas politik langsung. Ulama berpikir tentang manfaat yang lebih besar daripada hanya bersaing untuk kekuasaan dalam politik praktis. Idealisme politik para ulama sama sekali tidak berubah dan tidak bergeser dari idealisme kerakyatan dan kebangsaan, meskipun mereka terlibat langsung dalam bidang tersebut.<sup>6</sup>

Sejak tahun 1984, jam'iyah diniyyah ijtima'iyah ini telah menjauh dari aktivitas politik dalam konteks Nahdlatul Ulama. Setelah keluar dari Masyumi pada tahun 1950, NU menjadi partai politik. Partai NU didirikan pada tahun 1952 dan berpartisipasi dalam pemilihan pertamanya pada tahun 1955. Terlepas dari statusnya sebagai partai politik, Nahdlatul Ulama tidak terlena dengan praktik politik. Hingga hari ini, eksistensi negara sangat dipengaruhi oleh peran kebangsaan para ulama.

Banyak orang dalam Islam telah terpengaruh oleh popularitas *Ablussunnah Wal Jama'ah* sehingga mereka menyandarkan keagamaan dan kebijakan politik mereka pada apa yang dianut oleh mayoritas orang Islam. Untuk memungkinkan konsep dasar pemerintahan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* benar-benar terwujud, diperlukan kejelian dalam memilih dan mempertimbangkan setiap paham yang diakui sebagai

---

<sup>6</sup> <https://www.nu.or.id/opini/politik-kebangsaan-ulama-M5kWN> (Dikutip pada: Sabtu, 30 Maret 2024, Pukul 15.10 WIB)

*Ablussunnah Wal Jama'ah*, tentu dengan melakukan diskusi ilmiah yang beradab dan bertanggung jawab, disertai dengan referensi yang lengkap dan kuat.

### **Perspektif Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU)**

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlulsunah wal Jama'ah, sebuah cara berpikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dan ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu, Alquran dan Sunnah bukanlah satu-satunya sumber pemikiran kaum Muslimin; mereka juga menggunakan akal sehat dikombinasikan dengan fakta duniawi. Dalam bidang teologi, pemikir seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi mencontohkan cara berpikir ini. Di bidang tasawuf, metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi mengintegrasikan tasawuf dengan syariat.<sup>7</sup> Jadi, selain mengutamakan Alquran dan Sunnah sebagai dasar keagamaannya, NU juga mengembangkan ide-ide sebelumnya yang telah disebutkan di atas. Ahmad Zahro menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama mendasarkan keyakinan keagamaannya pada sumber ajaran Islam seperti Alquran, asSunnah, al-ijma', dan al-qiyas.<sup>8</sup>

NU tidak hanya diakui sebagai penganut paham *Ablus-Sunnah Wal-Jama'ah*, tetapi juga mengembangkannya secara lebih luas. Ini membedakannya dari organisasi-organisasi konvensional lainnya. Menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU), Aswaja (kependekan dari *Ablus Sunnah Wal-Jama'ah*) adalah pola keanekaragaman pemahaman dan praktik umat Islam yang didasarkan pada tradisi mazhabiyah. Ia merupakan rangka kerja ajaran Islam yang disusun dan diterapkan oleh Nabi dan para Sahabatnya. Untuk membuat Aswaja lebih jelas, ulama NU menempatkan kalam sebagai sistem kepercayaan, fikih sebagai aturan hidup, dan tasawuf sebagai tuntunan untuk membina akhlak dan mencerahkan rohani. Ini adalah tiga aspek ajaran Islam, bukan tiga ajaran terpisah. Untuk menjadikan paham Aswaja sebagai pegangan bagi organisasi dan warga Nahdliyin, ulama Nahdliyin telah membuatnya lebih jelas. Dalam hal *i'tiqad*, mereka menganut teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi; dalam fikih, mereka mengikuti salah satu dari empat Imam Mazhab: Abu Hanafi, Maliki Ibnu Anas, Muhammad Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hanbal; dan dalam tasawuf, mereka mengikuti ajaran Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.

Berdasarkan paham keagamaan, jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan NU dapat dilihat. Ini terbukti oleh penelitian Saiful Mujani (2002), yang menunjukkan bahwa 48% dari Muslim Santri Indonesia mendukung paham keagamaan. Menurut Suaid Asyari (2009), sekitar 51 juta Muslim Santri dapat dianggap mendukung Indonesia, dan 80 juta atau lebih Muslim memiliki keyakinan agama yang sama dengan keyakinan NU. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi mereka semua untuk disebut atau berafiliasi dengan National Union of Muslims (NU), baik secara keorganisasian maupun politik.<sup>9</sup> Ketika NU meninggalkan

---

<sup>7</sup> Situs Resmi Nahdlatul Ulama, "Paham Keagamaan NU" 16 Maret 2014. (online), sumber diakses dari <http://www.nu.or.id/lang.id-phpx//pahamkeagamaanNU.htm>, 14 Maret 2015 dan 5 Agustus 2017. Lihat pula Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik*, pp. 27-31

<sup>8</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), p. 19.

<sup>9</sup> Ahmad Asep Hidayat dkk, *Studi Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), p. 247.

politik praktis dengan konsep kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984, muncul gairah intelektualisme baru. Seolah-olah keputusan itu membuat warga dan elit Nahdlatul Ulama terbebas dari urusan politik praktis, memberi mereka waktu lebih banyak untuk berpikir dan memperbaiki peradaban kependidikan. Pada Mukhtamar di Situbondo tahun 1984, terpilihnya kiai Achmad Siddiq sebagai Rais "Aam Syuriyah" dan Abdurahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfiziyah PB NU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam di Nahdlatul Ulama. Ini juga memiliki makna strategis untuk terus menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai contoh gerakan intelektual daripada hanya gerakan politik

Tujuan NU terhadap paham sosial keagamaan yang melekat adalah menerapkan ajaran Islam yang menganut Ahlusunnah wal-Jama'ah untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan rahmat bagi semua orang. Untuk mencapai tujuan ini, Nahdlatul Ulama melakukan upaya-upaya: *Pertama*, di bidang agama, NU berusaha untuk terlaksananya ajaran Islam yang menganut keyakinan *Ahlu-sunnah Wal Jama'ah*. *Kedua*, di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, Nahdlatul Ulama mengupayakan dan mendorong pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan terampil, yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. *Ketiga*, di bidang sosial, Nahdlatul Ulama mengupayakan dan mendorong pemberdayaan dalam bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat pinggiran (*musatadl'afin*). *Keempat*, di bidang ekonomi, Nahdlatul Ulama berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan usaha untuk mencapai kemakmuran yang merata. *Kelima*, NU juga mengembangkan usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak untuk mewujudkan Khairah Ummah. *Keenam*, NU juga berusaha mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai, dan manusiawi, yang menuntut saling pengertian dan saling memerlukan.

Untuk mencapai hal ini, Nahdlatul Ulama bertekad untuk mengembangkan *ukhuvah Islamiyah, Wathoniyah, dan Insaniyah* yang bermanfaat bagi bangsa dan dunia dengan berpegang pada prinsip-prinsip *al-ikhlas* (ketulusan), *al-'adalah* (keadilan), *attawassuth* (moderasi), *at-tawazun* (keseimbangan), dan *at-tasamuh* (toleransi). Dengan tetap mempertahankan semangat yang mendasari berdirinya dan prinsip-prinsip yang ada dalam *Qanun Asasi*. Selain mengaplikasikan pemahaman sosial keagamaannya, NU memiliki tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk menjadikan NU sebagai organisasi tradisional dengan pemikiran dan pemahaman sosial keagamaan yang mengutamakan kemaslahatan umat (li maslahati al-ummati).<sup>10</sup>

## **Paradigma Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara**

---

<sup>10</sup> Ibnu Manshur Dalam ADRT NU Tahun 2010, (online) sumber diakses dari <http://www.muslimediate.com/2013/10/tujuan-nu-berlakunya-ajaran-islam.html>. Diakses 14 Maret 2015 dan 5 Agustus 2017.

Kiai Sahal Mahfudh mengatakan bahwa politik kekuasaan, juga dikenal sebagai politik tingkat rendah atau siayasad safilah, adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU. Namun, sebagai organisasi, NU harus menghindari politik seperti itu. Peran politik utama, seperti politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik, menunjukkan kepedulian NU terhadap politik. Dalam sejarah, National Union of Muslims (NU) memutuskan untuk menjadi partai politik pada tahun 1952. Mereka kemudian berpartisipasi dalam pemilu pertama mereka sebagai partai pada tahun 1955. Ketika NU berubah menjadi partai politik pada tahun 1952, peran dan perjuangan penting organisasi menjadi kurang penting. Mereka lebih banyak berkonsentrasi pada perlombaan politik praktis, sehingga pengabdian kepada umat menjadi terlupakan.

Dari kegelisahan ini, para kiai menyarankan agar NU secara organisasi kembali ke Khittah 1926. Usulan tersebut sempat ditolak. Namun, pada tahun 1971, seruan untuk kembali ke Khittah 1926 muncul lagi. Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan menganggap tindakan tersebut sebagai kemunduran historis pada saat itu. Rais "Aam KH Abdul Wahab Chasbullah mendukung pendapat Kiai Muhammad Dahlan bahwa kembali ke khittah tidak secara literal berarti kembali ke semangat perjuangan tahun 1926, tahun di mana NU didirikan.

Setelah seruan untuk kembali ke khittah sempat terhenti pada saat itu, gema itu muncul lagi pada tahun 1979 di Semarang, Jawa Tengah, saat Mukhtamar ke-26 NU diadakan. Selain itu, usulan untuk kembali menjadi jami'iyah diniyyah ijtimai'iyah dalam Mukhtamar tersebut tidak lengkap, seperti yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, Organisasi Keagamaan Nasional (NU) sedang berusaha keras untuk mendukung keinginan rakyat dari represi Orde Baru melalui PPP. Namun, pada praktiknya, kelompok yang sangat penting di kalangan kaum nasionalis mengalami penghapusan, yang mengurangi intensitas perjuangan partai tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa NU pernah menjadi partai politik untuk berpartisipasi dalam aktivitas nasional dan internasional. Seiring berjalannya waktu, kaum NU secara bertahap memasuki dunia politik. Mula-mula didirikan oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), NU akhirnya terlibat dalam masalah politik. Namun, MIAI tidak lama bertahan. Pada Oktober 1943, ia dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Masyumi awalnya adalah sebuah organisasi nonpolitik. Namun, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya diubah menjadi partai politik dan menetapkan NU sebagai tulang punggungnya.<sup>11</sup>

Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia dari tahun 1940-1950. Partai Masyumi memiliki banyak perbedaan kepentingan politik karena anggotanya yang heterogen. Dengan banyaknya jamaahnya, NU mendukung Masyumi. Namun, NU dipinggirkan hingga hanya menjadi alat pendulang suara. Akibatnya, mereka keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Setelah menjadi partai politik, NU memiliki sejarah yang luar biasa. Pada pemilu 1955, mereka mendapatkan banyak suara dan memperoleh 45 kursi di parlemen. Mereka

---

<sup>11</sup> Baca Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 2010

juga mendapatkan banyak suara pada pemilu berikutnya, pemilu 1971. Kemampuan NU untuk memupuk solidaritas di antara kaum santri dan mendapatkan dukungan penuh dari basis tradisionalnya adalah alasan keberhasilan NU.

NU didirikan untuk tujuan politik kekuasaan, tetapi untuk politik (keagamaan) kerakyatan yang abadi. Karena itu, kehadiran NU dianggap memberikan perlindungan bagi umat Islam Indonesia yang ingin menerapkan praktik dan pemikiran keagamaannya dekat dengan tradisi lokalnya. Dalam arti luas, jenis politik ini harus dianggap sebagai tingkat politik tertinggi. Dalam hal politik kekuasaan, NU terlibat pertama kali dengan membantu mendirikan Masyumi. Tokoh-tokoh NU bersaing untuk kekuasaan saat menjadi organisasi penyangga Masyumi. Ini terjadi baik dalam tubuh partai maupun di luar partai (eksekutif). Perpecahan, konflik politik yang terbilang kurang mengesankan, adalah hasil dari politik kekuasaan saat ini. Keterlibatan paling kuat dengan politik kekuasaan terjadi ketika NU berdiri sebagai partai politik pada tahun 1952 setelah bercerai atau berpecah dari Masyumi.<sup>12</sup>

Sebagai organisasi besar yang telah lama berkiprah di kancah politik nasional, tidak ada salahnya bagi NU untuk memiliki wadah aspirasi politik bagi anggota masyarakatnya. Ini dilakukan untuk mencegah perpecahan di antara anggota Nahdlatul Ulama sendiri, meskipun keterbukaan yang ada di antara mereka dalam menyampaikan aspirasi politik anggota mereka selama ini telah berjalan dengan baik. Politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Islam (NU) harus berfokus pada kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Ia adalah politik universalis paradigmatik daripada parsialistik. Untuk menghindari merusak nilai-nilai luhur para pendiri Nahdlatul Ulama dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dengan nasionalisme dan kepedulian sosial yang tinggi.

Kekuasaan bukan jalan pintas yang harus ditempuh untuk mewujudkan semuanya. Itu hanyalah salah satu cara. Meskipun NU sekarang terjebak dalam situasi yang sangat dilematis dan penting, pendekatan kultural dan sikap merakyatnya dapat menjadi alternatif sekaligus menumbuhkan kewibawaan tersendiri bagi organisasi. Di satu sisi, kaum Muslimin tidak ingin terlibat secara aktif dalam perpolitikan, sementara para tokoh dari kaum Muslimin memiliki "syahwat politik" yang sangat sulit untuk dibendung. Sebagai akibat dari sifat politik yang mendarah daging di antara kaum Muslimin, tampaknya kaum Muslimin tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan arena perpolitikan yang menyenangkan ini untuk waktu yang lama.

Sebenarnya, KH. Wahab Hasbullah telah menciptakan kekuatan politik Islam tradisional dalam tubuh NU jauh sebelum NU didirikan. Dia melakukan banyak aktifitas gerakan dalam rangka mewujudkan kekuatan politik. Hasilnya adalah munculnya lembaga seperti *Tashwirul Afkar*, *Nahdlatul Tujjar*, *Nahdlatul Wathan*, dan *Subbanul Wathan*. Dengan cara mereka masing-masing, ketiga lembaga ini menghasilkan berbagai organisasi kebajikan. Selanjutnya, NU mengeluarkan Resolusi

---

<sup>12</sup> Khamami Zada & A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), pp. 3-5.

Jihad pada tahun 1945, yang meningkatkan semangat para pembela Republik, terutama di Jawa Timur. Untuk mencapai persatuan bangsa, NU dengan tegas menentang "Piagam Jakarta" melalui wakilnya, KH. A. Wahid Hasyim, di PPKI.

Kedekatan dan keterlibatan NU dengan politik serupa dengan hubungan orang tua-anak. Kita tidak bisa menafikan bahwa para pendiri NU adalah tokoh politik yang sangat cerdas dan pintar. Meskipun mereka tidak secara terang-terangan menyuarakan pendapat politik mereka, pendirian dan perintah mereka mendukung pemerintahan yang adil. Sebab, seperti yang disebutkan sebelumnya, syariat tidak akan terjadi tanpa pemerintahan yang kuat. Dan NU tidak pernah terlibat dalam pemberontakan Islam selama menjadi organisasi sosial dan politik keagamaan. Menurut garis Ahlus Sunnah wal Jama'ah, komitmen terhadap negara dan bangsa adalah yang paling penting. Meskipun NU memiliki sejumlah model politik, pengalaman politik paling ideal dalam sejarahnya adalah yang ditawarkan oleh model kerakyatan dan kenegaraan. Dua teori ini membuat NU menjadi organisasi keagamaan yang berfokus pada kebaikan dan kesejahteraan umum (*mashlahatul 'ammah*). Meskipun demikian, NU tampak relatif dinamis dalam mempertahankan dua model politik ini karena godaan politik kekuasaan dari tokoh-tokoh dalam dan di luar NU. Pertama kali terlibat dengan politik kekuasaan adalah dengan memberikan dukungan organisasi terhadap pendiri Masyumi.<sup>13</sup>

Tidak hanya karena keinginan politik, NU terlibat dalam politik kekuasaan; ada alasan lain yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perpolitikan. Bergabungnya NU ke dalam "*Al Majlisul Islami 'Ala Indonesia*" (MAI) bersama Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan beberapa organisasi Islam lainnya adalah awal keterlibatan ini. NU juga mendukung berdirinya GAPPI pada tahun 1939. Namun demikian, NU, terutama dalam Masyumi, tidak bertahan lama. Dalam tubuh Masyumi, konflik dan kepentingan lama antara kubu tradisional dan modern kembali muncul. Kekecewaan politik di kalangan kaum Muslimin disebabkan oleh pengusuran peran politik kader NU di Masyumi oleh kelompok Islam modernis dan intelektual Islam. Dengan keberanian, NU meninggalkan Masyumi. Selain itu, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk menjadi partai politik dan berpartisipasi dalam pemilu 1955 untuk menjawab keraguan yang ada di kalangan politik saat itu. NU telah menunjukkan bahwa itu adalah partai politik yang harus dipertimbangkan dalam kompetisi politik nasional. NU memperoleh posisi ketiga dalam pemilu itu dengan memperoleh 45 kursi (18,4% suara) setelah PNI dan Masyumi. Di satu sisi, temuan itu meningkatkan kepercayaan warga terhadap NU, tetapi di sisi lain, menjadi magnet untuk membawa NU ke dalam konflik politik yang lebih pragmatis, mengakhiri tujuan awalnya sebagai organisasi sosial keagamaan.<sup>14</sup>

Atas desakan pemerintah Orde Baru, NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973. Mereka berpartisipasi dalam

---

<sup>13</sup> Abu Dzarrin Al-Hamidy, dkk, Sarung & Demokrasi, p. 5.

<sup>14</sup> Bahrul 'Ulum, Bodohnya NU apa NU DI Bodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik, (Semarang: Ar-Ruzz Press & PWIPNU Jawa Tengah, 2002), pp. 5580.

pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo, NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926, yang berarti tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Namun demikian, partai-partai yang menggunakan nama NU muncul setelah reformasi 1998. Abdurahman Wahid (Gus Dur), seorang tokoh fenomenal, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilu 1999, PKB memperoleh 51 kursi di DPR, yang mengantarkan Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi di DPR. Dengan memperoleh kursi di DPR, Nahdlatul Ulama semakin memasuki dunia politik dan berubah dari hanya menjadi ormas Islam menjadi organisasi politik atau parpol, menurut Greg Fealy. Tujuan politik NU saat menjadi parpol adalah untuk mendapatkan dana dari pemerintah, memiliki peluang bisnis, dan menduduki jabatan birokrasi. Sengaja atau tidak sengaja, tiga tujuan politik tersebut tampaknya menyebabkan NU menghadapi tantangan yang lebih besar untuk melaksanakan politik kerakyatan.<sup>15</sup>

### **Tujuan Politik NU**

Pemikiran politik Nahdlatul Ulama memiliki fleksibilitas. Pengembalian keputusan adalah salah satu contoh penerapan kaidah fikih. Krisis memerlukan pertimbangan baru tentang keuntungan dan kerugian. Moderatisme, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk menghindari tindakan yang ekstrim dan bersikap hati-hati saat berbicara dan bertindak. Selain itu, konsep tersebut digambarkan secara jelas dalam wacana NU secara makro. Perilaku moderat terutama cenderung memilih pendekatan yang umum dikenal sebagai "pendekatan jalan tengah", yang ditemukan baik dalam pemikiran Islam maupun karakteristik ideal budaya Jawa.

Penegakan hukum dan pembuatan undang-undang adalah metode politik yang paling mudah untuk mencapai tujuan Islam. Tujuan utamanya adalah menjamin pelaksanaan syariat Islam sebaik mungkin. Ini mencakup penerapan elemen-elemen hukum tentang pernikahan dan waris, peraturan tentang pembayaran dan distribusi zakat, penetapan waktu shalat Jumat dan kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, KH Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, mengingatkan bahwa kemanusiaan lebih penting daripada politik. Bukan perebutan kekuasaan, bukan trik untuk mempertahankannya, atau bukan praktik politik jahat yang penuh dengan kebohongan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena nilai-nilai luhur agama, Gus Dur menjunjung tinggi kemanusiaan dalam prinsip politiknya. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan, kata Gus Dur. Karena, menurut ajaran Islam, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyatnya. Ketiga hal ini adalah tujuan utama dari pembentukan negara.<sup>16</sup> Fondasi kebohongan tidak akan membawa sistem pemerintahan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum, tujuan luhur politik tidak dapat dicapai

---

<sup>15</sup> Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), p. 165.

<sup>16</sup> Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*, 2018

melalui intrik-intrik kebohongan dalam proses meraih kekuasaan politik. Praktik politik atau proses meraih kepemimpinan nasional harus dilakukan dengan melontarkan visi, program, dan tindakan nyata, bukan dengan mencari atau menggunakan amunisi untuk menyerang lawan politik.

Politik kekuasaan, yang biasanya disebut sebagai politik tingkat rendah atau *siyasah safilah*, menurut Kiai Sahal, adalah bagian partai politik dan warga negara, termasuk anggota NU, secara pribadi dan tidak atas nama organisasi. Namun, sebagai lembaga, NU harus menghindari politik jenis ini. Peran politik utama, seperti politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik, menunjukkan kepedulian NU terhadap politik. *Pertama*, NU harus menerapkan politik kebangsaan, yang berarti mereka harus secara konsisten dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai negara terakhir bagi bangsa Indonesia. *Kedua*, politik kerakyatan, yang berarti NU harus aktif mempromosikan hak-hak dan kewajiban rakyat, dan melindungi dan membela rakyat dari perlakuan sewenang-wenang. *Ketiga*, NU harus terus menerapkan etika berpolitik kepada kader dan warganya, serta masyarakat dan bangsa pada umumnya. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan dalam praktik politik dan kenegaraan.

Seperti yang disebutkan Greg Fealy, tujuan politik NU terdiri dari tiga komponen utama yang sangat terkait dengan tujuan keagamaannya. *Pertama*, memberikan dana pemerintah kepada kaum NU, terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan seperti pesantren, madrasah, dan masjid; serta membangun dan menjaga prasarana sosial seperti klinik kesehatan, rumah asuhan, dan balai pertemuan. *Kedua*, berusaha untuk mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah bagi lembaga pendidikan tinggi (NU) dan anggota masyarakatnya. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan dan dianggap memiliki kemampuan untuk membantu Islam dan masyarakat umum akan mendapatkan keuntungan langsung dari kesempatan ini. Ketika anggota masyarakat lebih sejahtera, mereka lebih mampu memenuhi kewajiban sosial dan keagamaannya, seperti berhaji, membayar zakat, dan mendukung upaya untuk meningkatkan pendidikan Islam dan kesejahteraan. Tujuan politik yang *ketiga* adalah memperoleh tempat bagi anggota NU dalam birokrasi. Selama era kolonial, para santri tradisional biasanya menghindari lembaga pemerintahan dan mengembangkan bisnis mereka di sektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan, birokrasi dianggap sebagai cara menuju status sosial dan mobilitas. Masuknya muslim tradisional ke dalam birokrasi dianggap akan meningkatkan peran Nahdlatul Ulama di masyarakat Indonesia dan memperkuat suara rakyat di pemerintah.

Meskipun pendekatan politik seperti itu berorientasi pada kepentingan, Nahdlatul Ulama tidak boleh serta merta dianggap oportunis. Sebaliknya, mereka lebih berusaha untuk membantu jamaah dan umatnya. Khususnya, mengoptimalkan thariqah atau metode untuk mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari komunitas bangsa yang tidak boleh pasif. Ini adalah hal yang wajar, normal, dan bahkan mungkin layak untuk dimasukkan ke dalam struktur institusi keumatan yang "berada"

untuk memastikan kelangsungan hidup umat secara keseluruhan dan selama jangka waktu yang tak terbatas.

### **Peranan NU dalam Perpolitikan Bangsa**

Berkaitan dengan bentuk ideal politiknya, tentu tidak dapat dipisahkan dari Khittah NU sendiri. Ini karena, selama ini, Khittah NU 1926 sering dianggap sebagai proses "depolitisasi" NU struktural. NU menuntut kembali ke gerakan sosial kemasyarakatan tanpa keterlibatan apa pun dalam politik praktis. Sesuai dengan kematangan paradigma sosial-etiknya, NU harus jentel, berani mengambil risiko, dan ksatria. Meskipun banyak orang yang tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. paling tidak disebabkan oleh sejumlah variabel berikut: *Pertama*, para elite NU suka berpolitik praktis. Memang, dari sejarahnya, organisasi nirlaba didirikan dalam hubungan dengan politik kekuasaan. Memisahkan Nahdlatul Ulama dari politik sama saja dengan melepaskannya dari konstruksi historisitasnya sendiri. *Kedua*, Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu-satunya organisasi di Indonesia dengan basis massa terbesar. Karena itu, NU menarik banyak pihak politik. Sejarah juga menunjukkan bahwa kekuatan massa lebih baik dimobilisasi sendiri daripada dimanfaatkan oleh kelompok politik selain NU. Ketika NU berfusi ke dalam Masyumi, mereka hanya digunakan sebagai kantong suara, dan orang-orang NU yang tergabung dalam partai tersebut selalu dibenci dan terpinggirkan.

*Ketiga*, karena warganya tidak mandiri secara politik, lembaga nirlaba kultural harus memiliki jalur politik yang resmi. Pada umumnya, warga NU, yang merupakan masyarakat awam, tidak percaya diri mengambil keputusan politik secara otonom dan independen kecuali mereka meminta pendapat kiai terlebih dahulu. Tradisi ini cukup kuat di kalangan anggota Nahdlatul Ulama. Menurut Asep Saeful Muhtadi, kiai di kalangan NU adalah seperti "makelar simbol" yang dapat menggabungkan nilai-nilai agama dengan bahasa politik yang mudah dipahami oleh konstituen (umat). Ini menunjukkan peran politik Nahdlatul Ulama sebagai pendidik politik yang mengajarkan kedewasaan politik sesuai dengan ideologi yang ditetapkan oleh pendiri/mu'assis Nahdlatul Ulama. *Keempat*, jika Khittah NU dipahami sebagai menunjukkan bahwa NU secara struktural tidak peduli dengan politik warganya sendiri, maka NU sendiri akan kehilangan. Kekuatan NU akan tercerai berai dan menjadi kecil. Karena itu, keyakinan warga NU dalam partai-partai ini tidak akan tetap utuh lagi, bahkan akan tergerus oleh keyakinan partai politik yang diikutinya. Ini akan menyebabkan ideologi Nahdlatul Ulama menguap dan kader-kadernya tidak lagi terlibat dalam perjuangan pembebasan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mereformasi Khittah NU pada tahun 1926. Khittah 1926 harus dipahami sebagai strategi politik, seperti yang sering digunakan Gus Dur saat situasi politik waktu itu tidak memungkinkan NU keluar dari alur politik praktis yang sangat terbatas. Gus Dur sangat lihai, dan dia selalu mengambil tindakan yang tepat dan lebih strategis untuk menghindari kegagalan. Ini adalah langkah non-politis dari (kiai) politik NU. Selain itu, Khittah NU 1926 harus dipahami sebagai upaya untuk mengintegrasikan dunia politik ke dalam agenda politik kebangsaan yang telah digagas sejak awal.

Dalam konteks pemberdayaan komunitas NU, politik praktis NU harus berfungsi sebagai perpanjangan dari tujuan politik kebangsaan NU. Gerak politik praktis tidak boleh melampaui garis besar ini. Jika orientasi parpol NU menyimpang dari tujuan politik kebangsaan yang signifikan, itu menunjukkan bahwa parpol telah melanggar semangat khittahnya. Dengan demikian, tujuan politik praktis juga merupakan agenda untuk memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi, intelektualitas, spiritualitas, dan semangat nasionalisme, yang merupakan pilar pendorong berdirinya NU.

Mengkaji diskusi tentang peranan ideal NU dalam kancah politik tentu bukan hal yang sulit karena NU sudah pernah merasakan perannya yang paling ideal ketika masih awal berdirinya di era awal perjalanan bangsa. Namun, dinamika kancah politik saat ini berbeda dengan saat itu. Menentukan bentuk NU yang paling ideal dalam kancah politik adalah tugas yang sulit dan rumit, tetapi itu mungkin jika semua elemennya bekerja sama untuk mencapainya. Oleh karena itu, tawaran politik kerakyatan dan kenegaraan harus dihargai dan dipelajari lebih lanjut jika benar-benar bermanfaat. Dari perspektif politik, politik kerakyatan dan kenegaraan adalah pilihan yang tepat karena tidak membatasi warga Nahdliyin yang ingin terus menyalurkan hasrat politiknya. Karena kita masih dapat berpolitik dengan suara rakyat dan nasionalisme untuk membantu kemajuan bangsa dan negara Indonesia di masa depan.

### **Kesimpulan**

Politik dalam NU, yang terdiri dari tiga kategori: politik kenegaraan, kerakyatan, dan praktis. Jika kita refleksikan politik kenegaraan harus menjadi prioritas pertama dari ketiga kategori tersebut. Menurut sejarahnya, NU adalah organisasi yang menghasilkan individu-individu yang berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai dasar negara. Ini dapat dilihat dari upaya KH. Wahid Hasyim, yang menentang penetapan piagam Jak arta sebagai dasar negara. Sudah seharusnya Nahdliyin (NU) memiliki peran terbaik dalam kancah politik Indonesia dengan bersikap netral terhadap kekuatan politik lainnya. Namun, jika kita melihat ke bawah, warga Nahdliyin, yang merupakan inti dari eksistensi NU, tampaknya tidak mendapat perhatian dari para pendukungnya karena mereka terlalu sibuk bermain politik praktis. Oleh karena itu, kerangka ideal NU sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) harus diperkuat untuk mencegah organisasi keagamaan terlemahkan oleh keinginan politik praktis yang dapat melemahkannya. Semangat dan struktur ini dapat digunakan bukan hanya oleh Nahdlatul Ulama, tetapi juga oleh organisasi Islam lainnya yang terus berjuang untuk posisi mereka di masyarakat kebangsaan. Dengan demikian, artikulasi sosiopolitik sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah akan berkembang secara paradigmatis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Dzarrin Al-Hamidy, dkk, *Sarung & Demokrasi*, p. 5.  
Ahmad Asep Hidayat dkk, *Studi Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), p. 247.

- Ahmad Zahro, Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, (Yogyakarta: LKiS, 2004), p. 19.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.
- Bahrul 'Ulum, Bodohnya NU apa NU DI Bodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik, (Semarang: Ar-Ruzz Press & PWIPNU Jawa Tengah, 2002), pp. 5580.
- Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 2010
- Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), p. 165.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=200>  
<https://www.nu.or.id/opini/politik-kebangsaan-ulama-M5kWN> (Dikutip pada: Sabtu, 30 Maret 2024, Pukul 15.10 WIB)
- Ibnu Manshur Dalam ADRT NU Tahun 2010, (online) sumber diakses dari <http://www.muslimedianews.com/2013/10/tujuan-nu-berlakunya-ajaran-islam.html>. Diakses 14 Maret 2015 dan 5 Agustus 2017.
- Khamami Zada & A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), pp. 3-5.
- Masmuni Mahatma, (2017). *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 31-54*
- Pengantar Ilmu Politik oleh Seta Basri, 2011, Indie Book Corner: Jokjakarta. H.15  
Perspektif ini juga disarikan salah satunya dari cara pandang Thomas Khun dan beberapa pemikir lain di bidang filsafat pengetahuan.
- Situs Resmi Nahdlatul Ulama, "Paham Keagamaan NU" 16 Maret 2014. (online), sumber diakses dari <http://www.nu.or.id/lang.id-.phpx//pahamkeagamaanNU> htm., 14 Maret 2015 dan 5 Agustus 2017. Lihat pula Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik*, pp. 27-31
- Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*, 2018